

Influence Of Determinant Factors On Report Quality Nagekeo District Skpd Finance

Susana Clarica Beka Yuju, Diah Ekaningtias

¹ Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, Wonorejo Utara No 16. Surabaya Jawa Timur, Indonesia

² Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, Wonorejo Utara No 16. Surabaya Jawa Timur, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 16/8/2023

Revised: 8/10/2023

Accepted: 19/11/2023

JEL Classification: H5, H7, M41, M42

Key words:

Accounting Information Systems, Government Accounting Standards, Organizational Culture, Internal Control Systems, Quality of Government Financial Reports

DOI:

10.14414/.....

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Accounting Information Systems, Government Accounting Standards, Organizational Culture, and Internal Control Systems on the quality of SKPD financial reports in Nagekeo Regency. In this study, the population used was SKPD employees in Nagekeo Regency and the sample for this study was 74 employees in the finance department. Selection of samples based on technique purposive sampling. The data collected is primary data obtained from distributing questionnaires. The analytical method used uses outer model and inner model. For data analysis tested using SmartPLS 4.0. The results of this study indicate that the Accounting Information System has an effect on the Quality of SKPD Financial Reports in Nagekeo Regency, Government Accounting Standards have no effect on the Quality of SKPD Financial Reports on Nagekeo Regency, Organizational Culture has no effect on the Quality of SKPD Financial Reports in Nagekeo Regency, and the Internal Control System has an effect on Report Quality SKPD Finance of Nagekeo Regency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintah, Budaya Organisasi, Dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Nagekeo. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah pegawai SKPD Kabupaten Nagekeo dan sampel penelitian ini adalah 74 pegawai bagian keuangan. Pemilihan sampel berdasarkan teknik *purposive sampling*. Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Metode analisis yang digunakan menggunakan *outer model* dan *inner model*. Untuk analisis data yang diuji menggunakan *SmartPLS 4.0*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Nagekeo, Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Nagekeo, Budaya Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Nagekeo, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Nagekeo.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah adalah entitas pelapor yang wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Bentuk pertanggungjawaban atau bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Bentuk pertanggungjawaban tersebut yaitu berupa penyajian laporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dapat dilihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapatkan penilaian tahunan berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pemerintah Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019, 2020, dan 2021 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Predikat wajar tanpa pengecualian yang diperoleh pemerintah Kabupaten Nagekeo diperoleh tiga kali sejak kabupaten ini berdiri pada tahun 2007. Pada tahun 2021 laporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nagekeo terdapat beberapa catatan yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), walaupun Pemerintah Nagekeo memperoleh predikat WTP, tetapi masih terdapat temuan yaitu kesalahan penganggaran belanja; dan penatausahaan serta pengamanan aset tetap yang belum sepenuhnya tertib (<https://ntt.bpk.go.id/pemerintah-kabupaten-tts-nagekeo-manggarai-timur-rote-ndao-dan-sumba-tengah-berhasil-mempertahankan-opini-wtp/>).

Sistem Informasi Akuntansi di Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 adalah suatu susunan mekanisme, mulai dari unsur-unsur seperti proses, pelaksana, alat, dan lain-lain, yang dirancang guna mampu merealisasikan manfaat akuntansi mulai dari kajian transaksi hingga tingkatan

pelaporan keuangan dalam organisasi pemerintahan (Sari et al. 2021). Penelitian Aldino dan Septiano, (2021) menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sedangkan Yanti *et al.*, (2020) memperoleh hasil bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010, "Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah". Penelitian Yanti *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sedangkan Qomah, (2021) memperoleh hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD.

Pada organisasi pemerintah seperti pemerintah daerah, budaya organisasi tergolong dalam tipe "*Hierarchy Culture*" yang juga dapat disebut "budaya birokrasi", yaitu organisasi yang memiliki struktur formal yang kuat dengan prosedur, aturan, kebijakan, hukum, kontrol, sanksi, dan strategi untuk stabilitas, efisiensi, dan prediktabilitas (Pramudhietha, 2021). Penelitian Silfiani *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif budaya organisasi pada pengelolaan laporan keuangan daerah, sedangkan Patty (2019) menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, "sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

* Corresponding author, diah_eka@perbanas.ac.id

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan” (Lestari dan Dewi, 2020). Penelitian Wulandari dan Octaviani, (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD, sedangkan Muda *et al.*, (2018) memperoleh hasil bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan penjelasan latar belakang yang memuat fenomena serta adanya *research gap* pada penelitian terdahulu maka, penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pengaruh Faktor Determinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd Kabupaten Nagekeo”.

2. KERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Teori yang digunakan adalah teori kegunaan keputusan (*Decision Usefulness*) yang dikemukakan oleh George J. Staubus pada tahun 1954, dalam disertasi Staubus dengan judul *An Accounting Concept of Revenue* di University of Chicago Amerika Serikat. Teori kegunaan-keputusan informasi ini pertama kali dikenal dengan nama *A Theory of Accounting to Investors*. Tujuan dari *Theory of Accounting to Investors* adalah menyediakan informasi keuangan mengenai perusahaan untuk digunakan dalam membuat keputusan investasi (Chairina dan Wehartaty, 2019).

Berdasarkan pernyataan Harahap Sofyan, (2012) konsep *Theory Decision Usefulness* akuntansi menjadi media dalam proses pengambilan keputusan sehingga teori akuntansi harus mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat. Konsep dari teori ini juga menekankan akuntansi digunakan untuk membuat kebijaksanaan dan membantu tugas pemerintah dan bagaimana agar informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan.

Kualitas Laporan Keuangan SKPD

Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa

“laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode”. Setiap kepala di instansi SKPD dibantu oleh Bendahara Penatausahaan Keuangan atau Akuntan SKPD dan Kepala Bidang Keuangan dalam menyusun laporan keuangan.

Laporan keuangan SKPD akan diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang memiliki wewenang untuk melakukan konsolidasi dengan laporan keuangan dari SKPD lain untuk membentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten Nagekeo yang lengkap dan komprehensif. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan PP NO 71 Tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah, meliputi sebagai berikut:

1. Relevan yaitu bahwa informasi yang dihasilkan memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediksi, disajikan tepat waktu, dan lengkap.
2. Andal yaitu bahwa informasi disajikan dengan jujur, dapat diverifikasi, dan netral.
3. Dapat dibandingkan yaitu laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode dan antar unit pemerintahan.
4. Dapat dipahami yaitu Informasi yang dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang dapat dipahami oleh pengguna.

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang dapat memberikan keefisienan dalam proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusunan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan daerah (Yanti, Made, and Setiyowati 2020). Menurut Romney dan Steinbart (2017:635) kualitas Sistem Informasi Akuntansi dapat diukur dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Kegunaan (*usefulness*)

Sistem informasi akuntansi yang berkualitas diharapkan dapat menghasilkan output informasi yang akan membantu pengguna dalam membuat keputusan.

2. Keandalan (Reliability)

Sistem informasi akuntansi harus memproses data secara akurat, lengkap dan netral.

3. Ketersediaan

Pengguna dapat mengakses system dengan nyaman dan system informasi akuntansi dapat memberi pelayanan secara tepat waktu bagi pengguna.

4. Pelayanan (*customer service*)

Sistem informasi akuntansi yang berkualitas diharapkan dapat memberikan pelayanan yang efisien terhadap pengguna.

5. Traktabilitas (*Tractability*)

Sistem informasi akuntansi mudah dipahami dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan pengembangan dimasa depan.

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku sekarang adalah SAP berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 (PP 71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan laporan operasional (LO), beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan laporan realisasi anggaran (LRA), belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam anggaran negara atau daerah.

Dalam PP NO 71 Tahun 2010 dalam standar akuntansi pemerintahan ada beberapa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan yang meliputi sebagai berikut:

1. Basis akuntansi, yaitu basis akrual untuk finansial dan basis kas untuk pelaksanaan anggaran.

2. Realisasi, yaitu pendapatan dan belanja pada basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

3. Periodisitas, yaitu laporan keuangan disajikan dalam periode-periode sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya dapat ditentukan.

4. Konsistensi, yaitu perlakuan akuntansi yang sama digunakan untuk transaksi atau kejadian yang sama antar periode.

5. Pengungkapan lengkap, yaitu informasi keuangan yang lengkap yang dibutuhkan pengguna disajikan pada laporan keuangan.

6. Penyajian wajar, yaitu laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi menjadi sistem keyakinan, nilai dan aturan yang dikembangkan di dinas pemerintahan yang merupakan landasan pedoman tingkah laku bagi pegawai-pegawainya untuk mengatasi masalah unsur eksternal dan integrasi internal (Silfiani, Wijayanto, and Fauzi 2021). Faktor yang mempengaruhi efektivitas budaya organisasi dalam suatu instansi menurut Patty (2019) :

1. Creating change yaitu kemampuan organisasi melakukan pembaharuan atau mengikuti perkembangan.
2. Customer focus yaitu kemampuan organisasi memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan.
3. Keadaan organisasi (Organization learning) yaitu kemampuan organisasi bertumbuh kearah yang lebih baik.
4. Strategi yang terarah dan tetap (Strategic direction and intent) yaitu kemampuan organisasi merencanakan tujuan atau misi organisasi yang jelas.
5. Tujuan dan sasaran (Goals and objectives) yaitu hasil yang diharapkan melalui usaha yang terarah dapat diukur, ambisius namun tetap realistis.

Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan PP RI Nomor 60 Tahun 2008 "Sis-

tem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas unsur:

1. Lingkungan pengendalian yaitu kondisi internal suatu lembaga negara yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern.
2. Penilaian risiko yaitu kegiatan yang memantau kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan pemerintah.
3. Kegiatan pengendalian yaitu tindakan pengendalian dalam mengetahui jalannya pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Informasi dan komunikasi yaitu bentuk penyelenggaraan komunikasi yang efektif, manajer unit kerja harus menyediakan dan menggunakan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; mengelola, mengembangkan, dan terus memperbarui sistem informasi.
5. Pengawasan yaitu pemeriksaan kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi audit dan evaluasi dapat diikuti.

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang memenuhi kebutuhan pemrosesan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan laporan yang diperlukan pihak eksternal (Zulfah *et al.*, 2017). Pada sistem informasi akuntansi, kualitas informasi yang diberikan sangat berpengaruh bagi keefektifan sistem. Informasi ini dikomunikasikan terhadap beragam pengambil keputusan. Dengan penerapan sistem informasi akuntansi di pemerintahan daerah dapat membantu pengolahan laporan keuangan yang efisien dan berkualitas.

H1: Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010, “Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena berdasarkan landasan prosedur Standar Akuntansi Pemerintah.

H2: Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo.

Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Budaya organisasi sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja jangka panjang maka budaya organisasi menjadi sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada, dipahami dan diimplementasikan di dalam suatu organisasi (Patty 2019). Dengan budaya organisasi yang baik dan dalam pemerintahan, menjadikan pegawai yang bekerja dibidang keuangan dapat berusaha membuat laporan keuangan yang akuntabel dan menghindari segala bentuk manipulasi dan kecurangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

H3: Budaya Organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo

Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

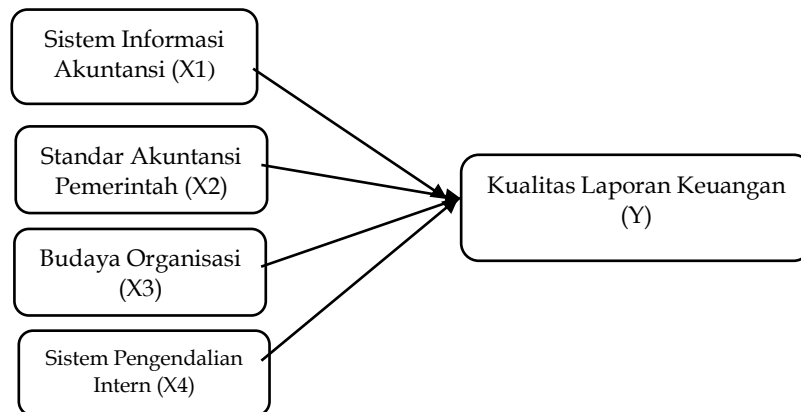
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern, “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan". Berdasarkan PP No 20 Tahun 2008 Pasal 11 Peran perangkat pengendalian internal yang efektif dari pemerintahan harus setidaknya:

- a. Memberikan jaminan agar tercapainya tujuan tugas instansi pemerintah.

- b. Meningkatkan efektivitas peringatan dini dan manajemen risiko.
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas pengelolaan tugas instansi.

H4: Sistem Pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo



3. METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Penelitian Kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang terdiri atas bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Sugiyono (2011: 7)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan kuesioner. Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner penelitian ini yaitu skala likert. Setiap pernyataan diukur dengan menggunakan skala likert 1 sampai 4. Jawaban diukur dengan nilai (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Setuju, dan (4) Sangat setuju.

Identifikasi Variabel

Penelitian ini menggunakan 4 variabel independent yang terdiri dari Sistem Informasi Akuntansi (X1), Standar Akuntansi Pemerintah (X2), Budaya Organisasi (X3), dan Sistem Pengendalian Intern (X4). Dan variabel dependen yang digunakan yaitu Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Definisi Operasional Variabel

1. Kualitas Laporan Keuangan SKPD

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, "laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan

dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan". Variabel ini diukur dengan menggunakan 10 item pernyataan yang dikembangkan oleh Wulandari dan Octaviani, (2020). Pernyataan kuesioner memuat instrument yang menggunakan indikator relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

2. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan berbagi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi (Lestari dan Dewi, 2020). Variabel ini diukur dengan menggunakan 12 item pernyataan yang dikembangkan oleh Wulandari dan Octaviani, (2020). Pernyataan kuesioner memuat instrument yang menggunakan indikator kegunaan (*usefulness*), keandalan (*Reliability*), ketersediaan, pelayanan (*customer service*), dan traktabilitas (*Tractability*).

3. Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, terkait Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 bahwa "Standar

Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP, yaitu suatu prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam membuat dan melakukan penyusunan dan laporan keuangan yang disajikan untuk pemerintah". Variabel ini diukur dengan menggunakan 13 item pernyataan yang dikembangkan oleh Wulandari dan Octaviani, (2020). Pernyataan kuesioner memuat instrument yang menggunakan indikator basis akuntansi, realisasi, perdioidisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.

4. Budaya Organisasi

Menurut Achamd Sudiro (2018), Budaya organisasi memengaruhi tindakan perilaku seseorang dan menjadi dasar pengembangan organisasi dan kebijakan yang diambil. Budaya organisasi sebagai system kesamaan makna tiap anggota yang membedakan organisasi ini dengan organisasi lain. Variabel ini diukur dengan menggunakan 10 item pernyataan yang dikembangkan oleh Patty, (2019). Pernyataan kuesioner memuat instrument yang menggunakan indikator *creating change, customer focus, organization learning, strategic direction and intent, goals and objectives*.

5. Sistem Pengendalian Intern

Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian intern pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa "proses yang sangat integral pada suatu tindakan dan kegiatan harus dilakukan secara terus-menerus oleh seorang pimpinan dan seluruh pegawai dalam memberikan suatu kepercayaan memadai atas tercapainya suatu tujuan dalam organisasi melalui pelaporan keuangan yang handal, pengamanan aset negara, efektif dan efisien, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan". Variabel ini diukur dengan menggunakan 10 item pernyataan yang dikembangkan oleh Wulandari dan Octaviani, (2020). Pernyataan kuesioner memuat instrument yang menggunakan indikator lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan.

Klasifikasi sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagekeo. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah pegawai yang berhubungan langsung dalam bidang keuangan suatu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Nagekeo yakni akuntan atau bendahara dan kepala bidang keuangan yang bekerja lebih dari 1 tahun. Dari 37 SKPD diambil sebanyak 2 sampel untuk setiap SKPD. Sehingga total sampel yang dibutuhkan adalah 74 sampel. Sampel yang merupakan bagian dari populasi dalam penelitian ini diambil dengan metode purposive sampling.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Kuesioner akan diisi oleh responden yaitu para pegawai yang bekerja dalam bidang keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Nagekeo.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Metode analisis data menggunakan PLS atau *Partial Least Squares* dengan program *SmartPLS 4*.

Analisis Data Deskriptif

Penelitian deskriptif kuantitatif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik itu satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lain (Sugiyono, 2016: 11).

Analisa Outer Model

Model yang digunakan kali ini adalah model pengukuran reflektif. Model ini dievaluasi dengan:

1. *Convergent validity* atau validitas *convergent* dengan melihat nilai *Lodiang factor* yang terdapat pada tabel *outer loadings*. *Loading factor* yang dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0.7 (Hair *et al*, 2019). Selain itu, perlu melihat nilai *Average Variance Extracted (AVE)* variable > 0,5 artinya syarat *convergent validity* yang baik sudah terpenuhi atau menunjukkan bahwa konstruk dapat

menjelaskan 50% atau lebih variasi itemnya (Sarsstedt *et al*,2017).

2. *Reliability* atau uji reliabilitas yang dilihat dari Nilai *Composite reliability* harus lebih besar dari 0.7 (Sarsstedt *et al*,2017). Selain itu, perlu meninjau nilai *Cronbach's alpha* diatas 0,7 (Ghozali dan Laten, 2015)
3. *Discriminan Validity* atau uji validitas *discriminant* dapat dilihat dari setiap item berkorelasi lebih tinggi dengan variabel yang diukur maka evaluasi *discriminant validity* terpenuhi (Ghozali dan Laten, 2015).

Analisa Inner Model

1. Pengujian *R-squared* ≤ 0.70 mengindikasikan bahwa model dikategorikan baik, hasil *R-squared* ≤ 0.45 mengindikasikan bahwa model dikategorikan moderat, sedangkan hasil *R-squared* ≤ 0.25 lemah (Ghozali, 2014:106).
2. Uji signifikansi menggunakan uji multikolinieritas. Ketentuan umum dari uji multikolinieritas adalah jika $VIF < 10$ atau < 5 serta *tolerance* > 0.10 atau 0.20 .

Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai *T statistic* $> 1,96$ yang artinya signifikan dan melihat nilai *statistic p-value* $< 0,05$ yang artinya berpengaruh dan *p-value* $> 0,05$ tidak berpengaruh (Ghozali, 2016).

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Deskriptif

Pengukuran nilai rata-rata akan dievaluasi terhadap interval kelas yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Jumlah kelas}}$$

Tabel 1
Kelas Interval

Interval	Kategori	Bobot
$3,26 \leq a \leq 4,00$	Sangat Setuju (SS)	4
$2,51 \leq a \leq 3,25$	Setuju (S)	3
$1,76 \leq a \leq 2,50$	Tidak Setuju (IS)	2
$1,00 \leq a \leq 1,75$	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Data diolah

Analisis Deskriptif Tanggapan Responden

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Rata-rata tanggapan responden dari KLK 1 sampai dengan KLK 10 berada dikisaran interval 3,26-4,00. Untuk angka terendah sebesar 3,51 dan angka tertinggi sebesar 3,77. Hal ini menunjukkan bahwa respon dari para responden yang berjumlah 74 orang mengenai variabel kualitas laporan keuangan berada dikategori sangat setuju. Dari hasil deskriptif dapat disimpulkan bahwa, penyajian laporan keuangan yang berkualitas menjadi suatu kewajiban setiap SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan.

Analisis Deskriptif Tanggapan Responden Terhadap Sistem Informasi Akuntansi

Rata-rata tanggapan responden dari SIA 1-SIA 5; SIA 7-12 berada dikisaran interval 3,26-4,00 dengan rata-rata paling rendah 3,50 dan tertinggi sebesar 3,62. Hal ini menunjukkan bahwa respon dari para responden yang berjumlah 74 orang mengenai variabel Sistem Informasi Akuntansi berada dikategori sangat setuju. Dari hasil deskriptif dapat disimpulkan bahwa, penerepan Sistem Informasi Akuntansi dapat mendukung penyajian laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

Analisis Deskriptif Tanggapan Responden Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah

Rata-rata tanggapan responden dari SAP 1 sampai dengan SAP 13 berada dikisaran interval 3,26-4,00 dengan rata-rata paling rendah 3,46 dan tertinggi sebesar 3,70. Hal ini menunjukkan bahwa respon dari para responden yang berjumlah 74 orang mengenai variabel standar akuntansi pemerintah berada dikategori sangat setuju. Dari hasil deskriptif dapat disimpulkan bahwa, Standar Akuntansi Pemerintah dapat menjadi pedoman dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

Analisis Deskriptif Tanggapan Responden Terhadap Budaya Organisasi

Rata-rata tanggapan responden dari BO 1 sampai dengan BO 10 berada dikisaran interval 3,26-4,00 dengan rata-rata paling rendah 3,41 dan tertinggi sebesar 3,62. Hal ini

menunjukkan bahwa respon dari para responden yang berjumlah 74 orang mengenai variabel budaya organisasi berada dikategori sangat setuju. Dari hasil deskriptif dapat disimpulkan bahwa, terciptanya budaya organisasi yang baik dapat mendukung dan memotivasi dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

Analisis Deskriptif Tanggapan Responden Terhadap Sistem Pengendalian Intern

Rata-rata tanggapan responden dari SPI 1

Outer Model

Uji *Convergent Validity* dan *Reliability*

sampai dengan SPI 10 berada dikisaran interval 3,26-4,00 dengan rata-rata paling rendah 3,51 dan tertinggi sebesar 3,72. Hal ini menunjukkan bahwa respon dari para responden yang berjumlah 74 orang mengenai variabel system pengendalian intern berada dikategori sangat setuju. Dari hasil deskriptif dapat disimpulkan bahwa, penerepan Sistem Pengendalian Intern dapat mendukung penyajian laporan keuangan pemerintah yang berkualitas

Tabel 7

Hasil Uji Convergent Validity dan Reliability

Variabel	Kode	Loading Factor	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
Sistem Informasi Akuntans	SIA 1- SIA 5; SIA7-SIA12	0.778-0.850	0.948	0.955	0.656
Standar Akuntansi Pemerintah	SAP 1- SAP13	0.708-0.811	0.933	0.942	0.556
Budaya Organisasi	BO 1- BO 10	0.714 -0.848	0.937	0.946	0.635
Sistem Pengendalian Intern	SPI 1 - SPI 10	0.730-0.863	0.935	0.944	0.630
Kualitas Laporan Keuangan	KLK 1 – KLK 10	0.716-0.836	0.926	0.937	0.599

Sumber: Data diolah SmartPLS 4

Uji data pertama menunjukkan bahwa memperoleh nilai yang tidak berkorelasi dengan variabel lainnya maka perlu dipertimbangkan dengan mengeliminasi pernyataan. Setelah dieliminasi dan melakukan pengujian kedua kalinya maka validitas diskriminan telah terpenuhi dan diperoleh hasil bahwa untuk nilai *loading factor* pada Tabel 7 lebih besar dari 0,7 sehingga memenuhi syarat. Untuk nilai pengujian

pernyataan SIA 6 pada validitas diskriminan *cronbach's alpha* pada Tabel 7 telah memenuhi syarat karena nilai yang diperoleh diatas 0,7. Pengujian nilai *composite reliability (rho_c)* pada Tabel 7 variabel itemnya sudah reliabel karena lebih besar dari 0,7. Pengujian AVE pada Tabel 7 memperoleh hasil nilai AVE variabel lebih besar dari 0,5 artinya syarat *convergent validity* yang baik sudah terpenuhi.

Discriminan Validity atau uji validitas *discriminant*

Tabel 8

Validitas Dsikriminan

Variabel	SIA	SAP	BO	SPI	KLK
SIA	0.850	0.552	0.632	0.680	0.651
SAP	0.460	0.733	0.430	0.357	0.449
BO	0.574	0.483	0.754	0.622	0.409
SPI	0.466	0.264	0.516	0.745	0.360

Variabel	SIA	SAP	BO	SPI	KLK
KLK	0.508	0.455	0.473	0.448	0.766

Sumber: Data diolah

Pada pengujian pertama untuk korelasi validitas diskriminan SIA 6 dan variabel lainnya tidak memenuhi atau tidak berkorelasi sehingga perlu adanya pertimbangan untuk menghapus pernyataan tersebut. Pada pengujian kedua menunjukkan bahwa validitas diskriminan Tabel 8 memiliki nilai korelasi

antara variabel lain dengan variabel itu sendiri lebih besar dibandingkan dengan nilai validitas diskriminan dan korelasi antara variabel tersebut dengan variabel lainnya (cetak tebal). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa korelasi setiap variabel pada validitas diskriminan terpenuhi.

Inner Model

Uji R-Square

Tabel 9
Uji R-Square

Keterangan		R-Square	R-Square Adjusted
Variabel Endogen	Kualitas Laporan Keuangan	0,624	0,062

Sumber: Data diolah SmartPLS 4

Berdasarkan hasil R-square pada Tabel 9 menunjukkan bahwa hasil dari pengujian model structural dalam penelitian ini menunjukkan angka 0,624 yang dimana hasil R-Square ini < 0,70 yang mengindikasikan bahwa model dikategorikan baik dan R-Square Adjusted menunjukkan angka 0,062 maka dapat dikatakan bahwa variabel independent mampu mempengaruhi variabel dependen. Oleh karena itu sistem informasi akuntansi, standar akuntansi pemerintah, budaya organisasi, dan system pengendalian intern mampu menjelaskan variabilitas konstruk kualitas laporan keuangan sebesar

Pengujian Hipotesis

Tabel 11
Koefisien Jalur

Hipotesis	Original Sampel (Q)	Sample Mean (M)	Standard Deviation	T Statistics	P Value	Kesimpulan
SIA->KLK	0.525	0.409	0.243	2.163	0.031	Diterima
SAP->KLK	0.249	0.350	0.205	1.215	0.224	Ditolak
BO ->KLK	-0.253	-0.259	0.147	1.720	0.086	Ditolak
SPI ->KLK	0.319	0.353	0.155	2.056	0.040	Diterima

Sumber: Data diolah SmartPLS 4.0

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Informasi

62,4% dan sisanya sebesar 37,6 diterangkan oleh konstruk lainnya diluar yang diteliti dari penelitian ini.

Uji Multikolinearitas

Tabel 10
Uji Multikolinearitas

Inner VIF Value	VIF	Keterangan
SIA->KLK	4.396	Non multicollinearity
SAP->KLK	1.822	Non multicollinearity
BO->KLK	3.662	Non multicollinearity
SPI->KLK	3.963	Non multicollinearity

Sumber: Data diolah SmartPLS 4.0

Pada Tabel 10 *colliearity statictis* (VIF) variabel system informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan memperoleh hasil 4.396, untuk variabel standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan memperoleh hasil 1.822, variabel budaya organisasi terhadap kualitas laporan keuangan memperoleh hasil 3.662, dan untuk variabel system pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan memperoleh hasil 3.963. Dari hasil yang diperoleh diketahui setiap variabel memperoleh hasil VIF < 5 maka setiap variabel menunjukkan *non multicollineariy*.

Akuntansi dan variabel Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo. Sedangkan, variabel Standar Akuntansi Pemerintah dan Budaya Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo

Sistem informasi akuntansi adalah unsur maupun subsistem atas satu organisasi yang merancang informasi keuangan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan (Wulandari dan Octaviani, 2020). Sistem Informasi Akuntansi yang dapat mendukung kualitas laporan keuangan yaitu dapat dilihat dari kegunaan, *reliability* (keandalan), ketersediaan, pelayanan, dan traktabilitas (Romney dan Steinbart, 2017:635).

Keterkaitan *Theory Decision Usefulness* atau teori kegunaan keputusan dengan penelitian ini yaitu ditinjau berdasarkan konsep *Theory Decision Usefulness* atau teori kegunaan keputusan yang menekankan komponen keandalan atau *reliability*, menyediakan informasi laporan keuangan tepat waktu, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Keandalan dalam teori kegunaan keputusan merupakan kualitas yang memberikan jaminan bahwa informasi itu secara rasional bebas dari kesalahan dan bias, serta mewakili apa yang digambarkan (Fauziah, 2022).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi dan variabel berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo. Faktor yang mendukung bahwa penerepan sistem informasi akuntansi di SKPD Kabupaten Nagekeo dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yaitu dapat dilihat dari tanggapan responden yang paling dominan pada *loading factor*. Tanggapan yang paling dominan yaitu sebesar 0.850, 0.841, dan 0.831. Faktor yang mendukung terdiri dari SIA pada SKPD dapat memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, SIA pada SKPD mempermudah pen-

yampaian mengolah data informasi, penerapan SIA di SKPD dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan informasi. SKPD Kabupaten Nagekeo khususnya pegawai bagian keuangan yang menyajikan laporan keuangan diharapkan untuk terus berupaya meningkatkan peninjauan yang lebih efektif dalam proses penginputan penyajian laporan keuangan dan perlu adanya sosialisasi terkait penggunaan dan kontribusi Sistem Informasi Akuntansi di SKPD untuk menghindari resiko kesalahan baik dalam penginputan maupun pengolahan laporan keuangan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Aldino dan Septiano, (2021) yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di instansi pemerintahan, sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yanti *et al.*, (2020) yang memperoleh hasil bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010, "Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah". Prinsip Standar Akuntansi Pemerintah yang mendukung tercapainya laporan keuangan yang berkualitas yaitu dapat diukur dari basis akuntansi, realisasi, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.

Keterkaitan teori kegunaan keputusan (*Theory decision usefulness*) dengan penelitian ini yaitu bahwa teori kegunaan keputusan dalam SFAC Nomor 2 menekankan konsep kelengkapan untuk memenuhi karakteristik relevan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam prinsip standar akuntansi pemerintah PP No 71 Tahun 2010 untuk mendukung tercapainya laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari

pengungkapan lengkap mulai dari informasi setiap transaksi akuntansi sampai dengan penyajian laporan keuangan.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah Tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Nagekeo. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Standar Akuntansi Pemerintah di SKPD Kabupaten Nagekeo belum efektif yaitu dapat ditinjau berdasarkan nilai *loading factor* yang diperoleh dari pernyataan kuesioner. Nilai *loading factor* 0.708 menunjukkan bahwa penyajian informasi akuntansi keuangan pemerintah belum sepenuhnya lengkap. Informasi akuntansi keuangan berkaitan dengan setiap transaksi baik anggaran maupun kas yang akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Nilai *loading factor* 0,721 menunjukkan bahwa catatan atas dasar kas dan penekanan peranan anggaran dalam siklus perencanaan pengelolaan APBD belum maksimal. Catatan atas dasar kas digunakan dalam penyusunan pelaksanaan anggaran. Nilai *loading factor* 0,726 menunjukkan bahwa peranan anggaran dalam siklus pengendalian pengelolaan APBD belum maksimal. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman pegawai terkait ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) khususnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD maka Pemerintah Kabupaten Nagekeo diharapkan perlu adanya sosialisasi dan pelatihan mengenai standar akuntansi pemerintahan sehingga mampu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia terutama bagian akuntansi atau tata usaha keuangan yang ada pada pemerintah daerah untuk lebih memahami terkait ketentuan yang ada pada standar akuntansi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Qomah, (2021) yang memperoleh hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan

penelitian Yanti *et al.*, (2020) yang menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah OPD.

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo

Budaya organisasi menjadi sistem keyakinan, nilai dan aturan yang dikembangkan di dinas pemerintahan yang merupakan landasan pedoman tingkah laku bagi pegawai-pegawainya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal (Silfiani, Wijayanto, and Fauzi 2021). Budaya organisasi yang mendukung penyajian laporan keuangan yang berkualitas dapat diukur atau ditinjau dari *creating change, customer focus, organization learning*, strategi yang terarah, tujuan dan sasaran (Patty, 2019). Keterkaitan *Theory Decision Usefulness* atau teori kegunaan keputusan dengan penelitian ini yaitu bahwa teori kegunaan keputusan dapat berdampak pada budaya organisasi dalam hal pengelolaan informasi keuangan yang transparan dan akurat. teori ini menekankan komponen relevan dan reliabilitas. Lingkup budaya organisasi yang baik di instansi pemerintahan khususnya bagian keuangan dapat mendorong pegawai atau akuntan untuk bekerja dengan efektif dalam membuat laporan keuangan yang relevan dan reliabilitas sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum sepenuhnya terbentuk budaya organisasi di lingkungan SKPD Kabupaten Nagekeo yang dapat mendukung penyajian kualitas pelaporan keuangan. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi dan ditinjau berdasarkan *loading factor* kuesioner. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Standar Akuntansi Pemerintah di SKPD Kabupaten Nagekeo belum sepenuhnya terbentuk yaitu dapat ditinjau berdasarkan nilai *loading factor* yang diperoleh dari pernyataan kuesioner. Nilai *loading factor* 0.848 menunjukkan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh instansi belum dituangkan secara jelas. *Loading factor* 0.837 menunjukkan belum

sepenuhnya terdapat tujuan arah jangka panjang di instansi. *Loading factor* 0.822 menunjukkan bahwa ada pegawai yang belum mengerti apa yang perlu dilakukan untuk berhasil dalam jangka panjang.

Budaya organisasi yang belum sepenuhnya terbentuk dapat mempengaruhi tujuan SKPD untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk mengatasi budaya organisasi yang belum sepenuhnya terbentuk di SKPD Kabupaten Nagekeo yaitu pemerintah Kabupaten Nagekeo atau setiap SKPD perlu mengadakan sosialisasi terkait tujuan, visi misi instansi maupun kabupaten, dan sosialisasi atau pelatihan pemahaman akuntansi terkait laporan keuangan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Patty, (2019) yang menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah, sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Silfiani *et al.*, (2021) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif budaya organisasi pada laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah". Berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 unsur sistem pengendalian intern yang mendukung penyajian laporan keuangan yang berkualitas yaitu adanya lingkungan pengendalian, analisis resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan kontrol atau pengawasan. Kaitan *Theory Decision Usefulness* atau teori kegunaan keputusan dengan penelitian ini yaitu bahwa konsep *Theory Decision Usefulness* atau teori kegunaan keputusan menekankan komponen reliabilitas dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sistem pengendalian intern memiliki tujuan yakni

menghasilkan informasi keuangan yang andal, dapat dipercaya, dan memiliki unsur reabilitas pelaporan keuangan (Setiawati dan Diana, 2011: 91).

Hasil dari penelitian membuktikan bahwa penerapan sistem pengendalian intern menjadi salah satu faktor terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang ditinjau dari nilai *loading factor* yang paling dominan. *Loading factor* 0,863 yang menunjukkan bahwa adanya penerapan pengendalian inter dalam setiap kegiatan operasional SKPD dapat mengurangi tingkat kecurangan. Pernyataan tersebut berkaitan aspek lingkungan pengendalian yang merupakan kejujuran dan nilai etika. Lingkungan pengendalian merupakan kondisi kondisi internal yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern di instansi yang mendukung pengembangan sistem pengendalian intern yang baik. *Loading factor* 0.837 menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam sistem informasi akuntansi sangat berguna untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pernyataan tersebut merujuk pada kegiatan pengendalian. Dalam mempertahankan dan meningkatkan sistem pengendalian intern yang efektif diharapkan Pemerintah Kabupaten Nagekeo khususnya setiap kepala SKPD beserta pengawas internal audit yaitu inspektorat untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan sehingga dapat meminimalisir ketidaksesuaian ataupun kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Wulandari dan Octaviani, (2020) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD, sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Muda *et al.*, (2018) yang memperoleh hasil bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo. Hal ini berarti, dengan penerapan atau penggunaan sistem informasi akuntansi menjadi salah satu faktor terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Faktor yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas terdiri dari SIA pada SKPD dapat memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, SIA pada SKPD mempermudah penyampaian mengolah data informasi, penerapan SIA di SKPD dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan informasi.
2. Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan di SKPD Kabupaten Nagekeo belum maksimal sehingga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Belum efektifnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di SKPD Kabupaten Nagekeo karena instansi atau pegawai belum sepenuhnya memahami SAP terkait kelengkapan informasi akuntansi keuangan pemerintah, catatan atas dasar kas yang digunakan dalam penyusunan pelaksanaan anggaran, penekanan perenan anggaran dalam siklus perencanaan pengelolaan APBD, dan penekanan peranan anggaran dalam siklus pengendalian pengelolaan APBD.
3. Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya terbentuk budaya organisasi di lingkungan SKPD Kabupaten Nagekeo

yang dapat mendukung penyajian kualitas pelaporan keuangan. Budaya organisasi belum sepenuhnya terbentuk di SKPD Kabupaten Nagekeo dikarenakan kemampuan organisasi mengikuti dalam mengikuti perkembangan dan kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan belum sepenuhnya efektif. Budaya organisasi yang belum sepenuhnya terbentuk dapat mempengaruhi tujuan SKPD untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

4. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa penerapan sistem pengendalian intern menjadi salah satu faktor terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Faktor yang mendukung sistem pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas yaitu adanya penerapan pengendalian inter dalam setiap kegiatan operasional SKPD dapat mengurangi tingkat kecurangan dan sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam sistem informasi akuntansi sangat berguna untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa keterbatasan yaitu:

1. Pada pengisian kuesioner ada beberapa kantor SKPD yang saat pengisian kuesioner tidak bisa diawasi dikarenakan responden tidak ada ditempat dan sedang sibuk, sehingga kuesioner diambil sehari setelahnya, maka adanya kemungkinan responden mengisi dengan tidak teliti dan tidak benar.
2. Penentuan kriteria sampel responden hanya terdiri dari pendidikan, masa kerja, usia, dan jenis kelamin.

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian, maka ada beberapa saran yang

dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya yang terdiri dari:

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mendampingi responden dalam mengisi kuesioner agar dapat menghindari adanya kesalahan pada saat pengisian sehingga

mempengaruhi validitas dan reliabilitas data yang diperoleh.

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan kriteria sampel responden seperti kepemilikan sertifikat diklat pelatihan atau seminar yang berkaitan tentang laporan keuangan pemerintah daerah

DAFTAR RUJUKAN

- Aldino, Helmi Prila, and Renil Septiano. 2021. "Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi, Pengendalian Internal Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* 7 (2): 50–62. <https://doi.org/10.31869/me.v7i2.2865>.
- Chairina, Frista, and Tineke Wehartaty. 2019. "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Bpkpd Kota Surabaya." *Jurnal Akuntansi Kontemporer* 11 (1): 31–39. <https://doi.org/10.33508/jako.v11i1.2073>.
- Lestari, Ni Luh Wayan Tiya, and Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi. 2020. "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 11 (2): 170–78. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1435.170-178>.
- Muda, Iskandar, Abdul Haris Harahap, E. Erlina, Syafruddin Ginting, Azhar Maksam, and Erwin Abubakar. 2018. "Factors of Quality of Financial Report of Local Government in Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 126 (1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/126/1/012067>.
- Patty, Meidylisa. 2019. "Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kepemimpinan Transformasional Sebagai Pemediasi." *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 01 (1): 66–82. E-ISSN 2686 5661.
- Qomah, Siti. 2021. "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 8 (1): 95–108. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i1.8718>.
- Sari, Maya, Nyimas Artina, Cherrya Dhia Wenny, Stie Mdp, and Jurusan Akuntansi. 2021. "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Camat Seberang Ulu Ii Palembang." *Core.Ac.Uk* 376400 (14): 376360. <https://core.ac.uk/download/pdf/80765912.pdf>.
- Silfiani, Mita, Sigit Ary Wijayanto, and Agus Khazin Fauzi. 2021. "Upaya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Dan Budaya Organisasi." *Strategic: Journal of Management Sciences* 1 (2): 54. <https://doi.org/10.37403/strategic.v1i2.15>.
- Wulandari, Dyah Rizky, and Andri Octaviani. 2020. "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *Journal Of Accounting and Financial* 5 (1): 1–12. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/aktual/article/view/633>.
- Yanti, Nanda Saputri, Anwar Made, and Supami Wahyu Setiyowati. 2020. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 8 (1): 1–8. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4455>.
- Zulfah, Indana, Sri Wahyuni, and Arina

Nurfaza. 2017. "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan* 3 (November): 46-57.

